

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. Keempat faktor ini merupakan tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan sesuai dengan arah kebijakan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi hanya dilaksanakan pada saat pelatihan-pelatihan itupun hanya berupa sisipan materi pada saat pelaksanaan pelatihan, dan selebihnya melalui pertemuan-pertemuan informal saja. Selanjutnya kejelasan informasi tentang standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK yang harus disampaikan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan masih belum dipahami secara utuh oleh sasaran kebijakan dan bahan bacaan Permendiknas tersebut jarang dibaca oleh kepala sekolah, sehingga masih ada kepala sekolah yang kurang memahami akan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimilikinya.

Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan belum melaksanakan sosialisasi secara khusus tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2015 Pemda Aceh Selatan mulai serius mengadakan sosialisasi tentang standarisasi kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dengan mengadakan diklat bagi calon kepala sekolah.

## **2. Sumberdaya**

Dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, jumlah pelaksana kebijakan sudah mencukupi. Selain itu mereka juga memiliki keahlian dibidang tugas masing-masing, dan mengenai ketersediaan informasi di lingkungan pelaksana kebijakan masih kurang memadai. Untuk itu keaktifan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk mengakses informasi secara mandiri. Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam sumberdaya adalah wewenang untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Dinas Pendidikan Aceh Selatan mampu menjalankan wewenangnya secara efektif. Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana sudah memadai dan dari segi keuangan juga sudah dianggarkan dalam APBK dan APBA. Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan sumberdaya khususnya dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK.

### **3. Disposisi**

Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan regulasi yang ada menunjukkan komitmen yang kuat dalam peningkatan mutu kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang profesional. Selanjutnya para pelaksana kebijakan juga diberikan insentif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan dedikasi. Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan disposisi khususnya dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan termasuk baik. Para pelaksana kebijakan menggunakan Permendiknas No.13 Tahun 2007 sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan, walaupun ada Peraturan Daerah berupa Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan juga terkait dengan standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, namun tidak dijadikan acuan. Selanjutnya pembagian tanggung jawab diantara pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik yang menyebabkan struktur birokrasi menjadi efektif. Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan struktur birokrasi khususnya dalam

pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

## **B. IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah disimpulkan di atas yang berkenaan dengan implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan yang berimplikasi pada:

### **1. Komunikasi**

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan mengenai kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Sosialisasi hanya dilaksanakan pada saat pelatihan-pelatihan itupun hanya berupa sisipan materi pada saat pelaksanaan pelatihan, dan selebihnya melalui pertemuan-pertemuan informal saja. Hal tersebut berimplikasi pada masih adanya kepala sekolah yang belum memahami secara utuh tentang kualifikasi dan kompetensi yang harus dimilikinya, ini dapat diketahui dari hasil uji kompetensi kepala sekolah (UKKS) SMK yang cukup rendah.

### **2. Sumberdaya**

Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan baik dari segi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas sudah cukup memadai hal ini berimplikasi pada terlaksananya sumberdaya khususnya dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, ini dapat dilihat dari 10 Kepala SMK Negeri yang ada di Kabupaten

Aceh Selatan 6 kepala SMK Negeri telah memenuhi kualifikasi khusus kepala SMK dengan memiliki sertifikat kepala sekolah (cakep).

### **3. Disposisi**

Pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan ataupun telah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan hal ini berimplikasi pada terbentuknya komitmen yang kuat antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dalam meningkatkan mutu kepala sekolah.

### **4. Struktur birokrasi**

SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah dilaksanakan, hal ini berimplikasi pada kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu dari sasaran kebijakan.

## **C. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah peneliti paparkan, berikut dikemukakan beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak, diantaranya adalah:

- 1.** Dinas Pendidikan dapat lebih meningkatkan intensitas kegiatan, pelatihan, workshop, dan seminar sosialisasi yang fokus pada kebijakan standar

kualifikasi dan kompetensi kepala SMK secara berkesinambungan. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan agar dapat menciptakan personil kerja yang berkualitas dan kompeten, serta melengkapi fasilitas dan meningkatkan anggaran yang dibutuhkan, menggunakan wewenang secara profesional dan memberikan reward-punishment bagi pelaksana kebijakan maupun sasaran dari kebijakan agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan mutu kepala sekolah.

2. Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan dapat meningkatkan kompetensi dan menjaga komitmen diajarannya dalam menjalankan kebijakan regulasi yang sudah ditetapkan. Dinas Pendidikan seharusnya melakukan program pemetaan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK untuk mengetahui tingkat kualifikasi dan kompetensi kepala SMK yang sesuai dengan standar kepala SMK.
3. Koordinator pengawas sekolah agar melakukan pembinaan bagi seluruh pengawas SMK untuk menjalankan fungsi kepengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap sasaran kebijakan sehingga dapat diperoleh sosok kepala sekolah yang profesional.
4. Kepala sekolah dituntut untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkelanjutan, serta proaktif dan kreatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber agar mampu membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan berkembang.